

Menavigasi Eksploitasi: Keamanan Manusia dalam Rantai Pasok Budi Daya Udang di Asia Tenggara

Dippo Alam Satrio¹, Siti Aliyuna Pratisti²

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Indonesia, dippo22001@mail.unpad.ac.id

²Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Indonesia, aliyuna@unpad.ac.id

ABSTRAK

Studi ini mengkaji eksploitasi tenaga kerja dalam rantai pasok budi daya udang di Asia Tenggara. Studi ini mencoba membahas fenomena tersebut dengan menggunakan teori keamanan manusia dalam menganalisis *global value chain*. Asia Tenggara telah berkembang menjadi salah satu kawasan produsen utama udang dan mengeksport udangnya ke berbagai negara maju, terutama Uni Eropa dan Amerika Serikat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui studi data sekunder, seperti laporan penelitian, artikel jurnal, dan berita. Temuan dari riset ini menunjukkan bagaimana tenaga kerja di tahap produksi mengalami ancaman dan kerentanan ekonomi, pangan, lingkungan, kesehatan, dan kerentanan personal di Vietnam dan Thailand. Hal tersebut diperparah dengan arsitektur GVC yang menekan negara-negara berkembang untuk menekan pekerjanya sehingga dapat mengambil margin keuntungan lebih besar. Studi ini menemukan bahwa GVC udang telah menciptakan sistem eksploitasi multidimensi yang sistematis dan saling terkait dengan menargetkan pekerja di tingkat produksi demi keuntungan perusahaan di pasar global.

Kata Kunci: industri udang, keamanan manusia, global value chain, Vietnam, Thailand, tenaga kerja

ABSTRACT

This study examines labor exploitation in shrimp farming supply chains in Southeast Asia. This study attempts to address this phenomenon by using human security theory to analyze global value chains. Southeast Asia has developed into one of the major shrimp producing regions and exports its shrimp to various developed countries, especially the European Union and the United States. This research uses qualitative methods through the study of secondary data, such as research reports, journal articles, and news. The findings of this research show how workers in the production stage experience economic, food, environmental, health and personal vulnerabilities and threats in Vietnam and Thailand. This is exacerbated by the GVC architecture that pressures developing countries to suppress their workers so that they can take a larger profit margin. This study finds that shrimp GVCs have created a systematic and interconnected system of multidimensional exploitation by targeting workers at the production level for corporate profits in the global market.

Keywords: shrimp industry; human security; global value chain; Vietnam; Thailand; labor force

Pendahuluan

Udang telah bertransformasi dari hidangan mewah menjadi komoditas global yang dapat diakses dan terjangkau secara luas di rak-rak supermarket di Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Eropa. Popularitasnya yang meroket didukung oleh rantai pasok global yang sangat efisien, yang mampu mengirimkan produk beku dari tambak-tambak di Asia Tenggara ke meja makan di Barat dalam waktu singkat. Namun, di balik harga yang menarik bagi konsumen, tersembunyi "biaya tersembunyi" (*hidden cost*) yang ditanggung oleh para pekerja di ujung paling awal dari rantai pasok ini (Walhout, 2024). Laporan-laporan investigatif dari berbagai *non-governmental organizations* (NGOs) dan media

secara konsisten mengungkap adanya pelanggaran hak asasi manusia dan perburuan yang parah, termasuk bentuk-bentuk kerja paksa, di sektor ini (CBS NEWS, 2024). Artikel ini berangkat dari paradoks sentral tersebut: bagaimana sebuah produk yang secara historis diasosiasikan dengan kemewahan dapat diproduksi dan dijual dengan harga yang begitu rendah, dan siapa yang pada akhirnya menanggung selisih biaya dari efisiensi yang dipaksakan ini?

Pernyataan masalah yang mendasari penelitian ini adalah bahwa insiden tenaga kerja paksa, jeratan utang, dan kondisi kerja yang tidak manusiawi di industri udang bukanlah anomali atau kasus terisolasi yang disebabkan oleh segelintir aktor. Sebaliknya, praktik-praktik ini merupakan hasil yang bersifat sistemik dari arsitektur Rantai Nilai Global (GVC) itu sendiri, sebuah sistem yang mentransfer risiko dan tekanan ke bawah menuju aktor yang paling lemah dan paling tidak berdaya, yakni para pekerja (CBS NEWS, 2024). Fenomena yang dilaporkan oleh media internasional, seperti CBS News mengungkap bahwa praktik tenaga kerja paksa di industri udang merupakan fenomena yang sistemik dalam arsitektur GVC. Temuan ini mendorong kebutuhan untuk melihat lebih dalam pada bagaimana struktur global dan dinamika pasar internasional berkontribusi terhadap kondisi kerja yang eksploitatif. Untuk memperkuat pemahaman tersebut, terdapat penelitian-penelitian terdahulu yang memberikan bukti empirik mengenai eksploitasi tenaga kerja di industri udang.

Penelitian “*Net Profits, Human Costs: How Supermarkets shape exploitation in shrimp aquaculture*” dari Migunani, AKATIGA, dan ELSAM melihat bahwa terdapat hubungan antara tekanan harga dari *market states*, terutama dari Barat dengan praktik kerja paksa di tingkat produksi dengan menggunakan sebelas Indikator Kerja Paksa dari *International Labor Organization* (ILO) (Migunani et al., 2024, 3). Terdapat empat temuan kunci dari penelitian tersebut: (1) Tenaga kerja, yakni kondisi tenaga kerja di budi daya udang dan tempat pengolahan awal banyak melanggar indikator ILO untuk Tenaga Kerja Paksa dan lebih buruk dari bagian lain rantai pasok, seperti *debt bondage*, pemangkasan gaji yang meluas, penipuan, dan *abuse of vulnerability* dengan sengaja memberikan jam kerja yang tidak manusiawi serta menyunat hak-hak pekerja untuk membentuk serikat pekerja melalui intimidasi, pengaturan kerja yang informal membentuk risiko tinggi kerja paksa di rantai pasok udang yang berorientasi ekspor; (2) Produk, ditemukan setidaknya setengah dari udang yang diekspor dari Indonesia bersumber dari tambak udang yang mempekerjakan tenaga kerja informal –68% dari tambak udang tradisional dan semi-intensif– yang rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan hak pekerja, meningkatkan kerentanan mereka terhadap tenaga kerja paksa dengan absennya kontrak, lingkungan kerja yang buruk dan abusif; (3) Harga, studi tersebut menyoroti dampak dari struktur harga di dalam rantai pasok udang terhadap kondisi tenaga kerja yang mana budi daya udang memiliki keuntungan margin terendah dan merupakan hubungan yang paling rentan dalam rantai pasok sehingga biaya tenaga kerja menjadi target paling empuk untuk menahan kenaikan harga dalam logistik, kelistrikan, dan benih untuk tetap untung; (4) Kegagalan Pasar, ditemukan bahwa terdapat hubungan yang jelas antara pelanggaran hak asasi manusia dan tenaga kerja di tingkat produksi dalam rantai pasok udang Indonesia dan strategi penetapan harga peritel internasional, ditambah dengan hubungan saling memengaruhi antara sisi *demand* dan *supply* membuat kondisi tenaga kerja semakin tereksplotasi. Keempat temuan tersebut memberikan bukti nyata dari hubungan sebab akibat yang seringkali tersembunyi di industri udang Indonesia dalam hubungannya dengan perdagangan antarnegara, terutama dengan negara-negara Barat.

Temuan AKATIGA sejalan dengan laporan *Smash and Grab: Conflict, Corruption, and Human Rights Abuses in the Shrimp Farming Industry* yang diterbitkan oleh Environmental Justice

Foundation dan WildAid (2003), yang menyoroti bahwa industri budi daya udang juga kerap melibatkan konflik lahan, perampasan sumber daya, degradasi lingkungan, serta dampak sosial yang tidak proporsional terhadap komunitas lokal, perempuan, dan anak-anak. Laporan tersebut menyimpulkan bahwa biaya sosial dari budi daya udang seringkali melampaui keuntungan ekonomi yang dihasilkan. Sementara itu, Pegler (2011) dalam studinya mengenai *sustainable value chains* mengungkap paradoks globalisasi, di mana peningkatan standar dan regulasi ketenagakerjaan secara formal tidak selalu berbanding lurus dengan perbaikan kondisi pekerja di tingkat sumber. Terakhir, Brugere et al. (2023) menekankan minimnya perhatian terhadap dimensi sosial dan manusia dalam pengembangan akuakultur, serta urgensi untuk menggeser model bisnis menuju pendekatan yang lebih berkeadilan dan berpusat pada hak asasi manusia.

Secara umum, literatur-literatur tersebut menyoroti adanya relasi kuasa yang timpang di sepanjang rantai nilai industri udang—dari *hatchery* hingga ritel di negara pasar—yang secara sistematis merugikan tenaga kerja di sektor produksi. Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih menempatkan eksploitasi tenaga kerja sebagai isu ketenagakerjaan atau hak asasi manusia semata. Penelitian ini melengkapi literatur yang ada dengan mengkaji fenomena tersebut melalui lensa *human security*, yang memposisikan pekerja sebagai *referent object* utama. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih holistik terhadap bagaimana eksploitasi tenaga kerja dalam GVC tidak hanya berdampak pada upah, tetapi juga mengikis berbagai dimensi keamanan manusia sebagai konsekuensi dari hubungan ekonomi antara negara-negara produsen di Asia Tenggara dan negara-negara Barat sebagai *market states*.

Penelitian ini menggunakan laporan AKATIGA sebagai basis empiris utama dengan Indonesia sebagai kasus dasar (*baseline case*), mengingat kedalaman dan granularitas data yang tersedia. Analisis tersebut kemudian diperluas secara komparatif dengan melihat kondisi di Thailand dan Vietnam untuk menilai apakah pola eksploitasi dan kerentanan serupa juga muncul di negara produsen udang lainnya di Asia Tenggara. Sasaran utama penelitian ini adalah untuk menunjukkan bahwa praktik pembelian yang menekan harga oleh peritel besar di negara pasar menciptakan tekanan ekonomi yang signifikan di tingkat produsen, yang kemudian dialihkan secara sistematis ke biaya tenaga kerja. Tekanan ini mendorong meluasnya kerja informal dan praktik eksploitatif yang, secara kumulatif, mengikis berbagai dimensi keamanan manusia pekerja. Dinamika tersebut semakin diperparah oleh tekanan struktural dalam perdagangan internasional, seperti ancaman tarif anti-dumping, yang mempersempit margin produsen dan memperdalam kerentanan tenaga kerja.

Hasil dan diskusi dalam artikel ini dibagi ke dalam empat bagian. Pertama, artikel ini membedah anatomi eksploitasi tenaga kerja di tingkat produksi dengan menggunakan laporan AKATIGA sebagai basis analisis untuk kasus Indonesia, serta data komparatif dari Thailand dan Vietnam untuk mengidentifikasi pola regional. Kedua, dampak eksploitasi tersebut dianalisis melalui lensa *human security* untuk menunjukkan bagaimana kerugian yang dialami pekerja melampaui dimensi ekonomi semata. Ketiga, artikel ini mengkaji arsitektur tekanan tersebut melalui kerangka GVC guna memetakan asimetri kekuasaan dan distribusi nilai dalam rantai pasok global. Terakhir, artikel ini diakhiri dengan kesimpulan.

Kajian Literatur

Keamanan Manusia

Riset terkait keamanan manusia menempatkan pendekatan “*people-centered*” sebagai inti dari analisisnya (Indraswari, 2024, 355). Konsep Keamanan Manusia pertama kali diperkenalkan oleh UNDP (United Nations Development Program) pada tahun 1994 dengan tujuan untuk menyediakan indikator yang lebih detail dan dapat diukur. Konsep ini dilatarbelakangi oleh adanya perluasan makna dari kata “aman” itu sendiri dari yang awalnya hanya terpaku pada konteks militer dan negara saja menjadi terpaku pada ketiadaan ancaman dan meningkatkan kapabilitas seorang individu untuk memenuhi kebutuhan dasar dan harga dirinya (Mumtazinur & Wahyuni, 2021, 78). Keamanan Manusia dapat dikategorikan menjadi tujuh elemen utama, yakni keamanan ekonomi, keamanan pangan, keamanan kesehatan, keamanan lingkungan, keamanan *personal* atau pribadi, keamanan komunitas, dan keamanan politik (Indraswari, 2024, 355). Ketujuh elemen tersebut diidentifikasi menjadi dua elemen utama dari Keamanan Manusia, yaitu “*freedom from fear*” dan “*freedom from want*” (Mumtazinur & Wahyuni, 2021, 79). Hal ini dapat dijelaskan bahwa ancaman kepada manusia dapat berasal dari dua hal utama, yaitu rasa aman dari ancaman-ancaman bahaya kronis dan perlindungan dari gangguan tak terduga dan menyakitkan dalam kehidupan sehari-hari. Tabel 1 menunjukkan jenis dari kerentanan manusia dan akar masalahnya, menurut laporan UNDP.

Berdasarkan kerangka UNDP, ancaman terhadap keamanan manusia dapat bersumber dari berbagai akar masalah struktural. Kerentanan ekonomi, misalnya, berakar pada kemiskinan berkelanjutan, pengangguran, dan keterbatasan akses terhadap kesempatan ekonomi. Kerentanan pangan muncul akibat kelaparan dan fluktuasi harga pangan yang tajam, sementara kerentanan kesehatan berkaitan dengan epidemi, malnutrisi, serta minimnya akses terhadap layanan kesehatan dasar. Dimensi lingkungan mencakup degradasi lingkungan dan kelangkaan sumber daya, sedangkan kerentanan personal berkaitan dengan kekerasan fisik, perdagangan manusia, dan kerja paksa. Adapun kerentanan komunitas dan politik berakar pada konflik berbasis identitas, terorisme, penindasan politik, serta pelanggaran hak asasi manusia (UNDP, 1994).

Gambar 1: Jenis Kerentanan Manusia dan Akar Masalahnya Berdasarkan UNDP

Jenis Kerentanan	Akar Masalah
Ekonomi	Kemiskinan berkelanjutan, pengangguran, kurangnya akses kredit dan kesempatan ekonomi lainnya.
Pangan	Kelaparan dan naiknya harga pangan secara mendadak karena tingkat fluktuasi harga.
Kesehatan	Epidemi, malnutrisi, kurangnya sanitasi dan akses terhadap <i>basic health care</i> .
Lingkungan	Degradasi lingkungan, kelangkaan sumber daya, dan bencana alam.
Personal	Kekerasan fisik dalam segala bentuknya, perdagangan manusia, dan tenaga kerja anak.

Komunitas	Ketegangan antar etnis, agama, dan ketegangan berbasis identitas lainnya serta terorisme.
Politik	Penindasan politik, pelanggaran hak asasi manusia, dan ketiadaan hukum.

Konsep ini dianggap mekanisme yang ideal karena dapat menerjemahkan masalah-masalah yang kompleks dengan perspektif negara dan orang-orang di dalamnya. Fokus utama atau *referent object* keamanannya adalah *individual/people* dengan ancaman yang bergeser dari ancaman tradisional menjadi ancaman non-tradisional yang langsung memengaruhi kehidupan individu di suatu tempat. Berbeda dengan konsep keamanan nasional yang hanya terpaku pada perspektif negara saja. Namun, pendekatan ini banyak dikritik karena berbagai hal, seperti ruang lingkupnya yang terlalu luas sehingga dianggap “*explains nothing*” oleh Krause (2004) karena mencoba menjelaskan hampir semuanya atau kerapuhannya dalam menjawab masalah-masalah global yang semakin kompleks serta adanya *gap* yang besar antara negara-negara maju dan berkembang dalam mengadopsi konsep tersebut (seperti dikutip dalam Caballero-Anthony, 2016, 27). Pada dasarnya, keamanan manusia pada awalnya difokuskan untuk melindungi individu dari ancaman dan mendorong pembangunan sehingga belum ada sistem yang mampu menopang konsep tersebut dengan pendekatan praktis. Newman (2020) mendorong perlunya riset interdisipliner dan upaya kebijakan yang ditargetkan pada isu-isu yang sedang berkembang, seperti konflik bersenjata, pencegahan penyakit, dan perdagangan manusia (seperti dikutip dalam Indraswari, 2024, 357). Pada tatanan yang lebih luas, memang terdapat banyak kelemahan dalam konsep tersebut, tetapi secara konseptual, keamanan manusia memperluas ruang lingkup keamanan yang awalnya terlalu terpaku pada negara dan mencoba menantang *state-centric approach* (Hama, 2017, 15). Pendekatan tersebut kemudian diadopsi oleh Kanada yang berfokus pada aspek ‘freedom from fear’ dengan melihat ketiadaan ancaman terhadap nilai inti manusia dan Jepang yang berfokus pada ‘freedom from want’ yang berfokus untuk memastikan kelangsungan hidup dan harga diri individu sebagai manusia (Caballero-Anthony, 2015, 1-2).

Dalam penelitian ini, kerangka keamanan manusia digunakan untuk menggeser fokus analisis dari negara dan pasar menuju individu sebagai *referent object* utama keamanan. Dari tujuh dimensi keamanan manusia yang diperkenalkan oleh UNDP, penelitian ini secara sengaja memfokuskan analisis pada lima dimensi yang paling relevan dan memiliki dukungan empiris kuat dalam konteks industri udang di Asia Tenggara, yaitu keamanan ekonomi, keamanan pangan, keamanan kesehatan, keamanan personal, dan keamanan lingkungan. Penyempitan fokus ini dilakukan untuk menjaga kedalaman dan koherensi analisis, serta menghindari penggunaan konsep keamanan manusia secara terlalu luas dan deskriptif.

Kelima dimensi tersebut dioperasionalkan melalui indikator-indikator empiris yang dapat diamati secara langsung di tingkat produksi. Keamanan ekonomi dianalisis melalui stabilitas dan transparansi upah serta kepastian kerja; keamanan pangan melalui akses pekerja terhadap makanan yang layak dan bergizi; keamanan kesehatan melalui keselamatan kerja dan kondisi lingkungan kerja; keamanan personal melalui keberadaan paksaan, intimidasi, atau kekerasan; dan keamanan lingkungan melalui dampak degradasi lingkungan akibat praktik budi daya udang dan eksploitasi

sumber daya alam yang berlebihan. Dengan operasionalisasi ini, kerangka keamanan manusia tidak hanya berfungsi sebagai konsep normatif, tetapi juga sebagai alat analisis untuk memahami bagaimana tekanan struktural dalam rantai nilai global diterjemahkan menjadi kerentanan multidimensional dalam kehidupan pekerja.

1. Global Value Chain (GVC)

Dalam konteks ekonomi politik internasional dan hubungan perdagangan antara negara dengan kekuatan relatif yang berbeda, interaksi antara produsen di negara berkembang dan pasar di negara maju terhubung melalui suatu rantai nilai lintas negara. Kerangka *Global Value Chain* (GVC) digunakan untuk menjelaskan bagaimana proses produksi, distribusi, dan konsumsi suatu komoditas tersebar secara global, serta bagaimana nilai dan kekuasaan didistribusikan di sepanjang rantai tersebut—terutama ketika negara berkembang berperan sebagai produsen bahan mentah atau komoditas berorientasi ekspor.

Kaplinsky dan Morris mendefinisikan GVC sebagai rangkaian aktivitas yang diperlukan untuk membawa suatu produk atau jasa dari tahap konsepsi, melalui berbagai proses produksi, hingga pengiriman kepada konsumen akhir dan penggunaan terakhir, di mana setiap tahap proses tersebut berkontribusi dalam menambah nilai produk (Kaplinsky & Morris, 2000, dikutip dalam Dijk & Trienekens, 2012, 13). Karakteristik utama GVC adalah fragmentasi dan spesialisasi produksi lintas wilayah dan negara, sehingga satu komoditas dapat diproduksi melalui berbagai tahapan yang tersebar secara geografis. Fragmentasi ini menciptakan kebutuhan akan koordinasi yang kompleks dan menghasilkan interdependensi antara aktor-aktor yang terlibat di dalam rantai nilai global.

Sebagian besar GVC beroperasi dalam struktur rantai nilai yang bersifat vertikal, di mana setiap tahapan produksi memiliki posisi dan tingkat kontrol yang berbeda (Dijk & Trienekens, 2012, 14). Struktur vertikal ini tidak hanya mencerminkan pembagian kerja internasional, tetapi juga relasi kuasa yang tidak setara di dalam sistem perdagangan global. Aktor tertentu—terutama mereka yang menguasai akses pasar dan penetapan standar—memiliki kemampuan lebih besar untuk menentukan aturan main, sementara aktor di tingkat produksi sering kali berada dalam posisi yang lebih lemah.

Konsep rantai nilai sendiri berakar pada pemikiran Michael Porter, yang mendefinisikan rantai nilai sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk menciptakan dan mengirimkan produk atau jasa bernilai ke pasar (Jones et al., 2019, 2). Porter membagi aktivitas tersebut ke dalam lima aktivitas primer, yakni *inbound logistics*, *operations*, *outbound logistics*, *marketing and sales*, serta *post-sale services*. Meskipun konsep Porter awalnya dikembangkan untuk analisis perusahaan, pendekatan ini kemudian diperluas ke tingkat global seiring dengan meningkatnya fragmentasi produksi lintas negara.

Perlu dibedakan antara konsep rantai nilai dan rantai pasok (*supply chain*), yang sering digunakan secara bergantian dalam diskursus populer. Rantai pasok umumnya merujuk pada hubungan input–output dalam proses produksi, sedangkan GVC merupakan perluasan internasional dari konsep tersebut yang secara eksplisit mempertimbangkan dimensi lintas negara, struktur tata kelola, dan distribusi nilai (Jones et al., 2019, 3). Dengan demikian, GVC tidak hanya menggambarkan alur produksi, tetapi juga menyoroti bagaimana kekuasaan, keuntungan, dan risiko didistribusikan di sepanjang rantai tersebut.

Perkembangan GVC sangat dipengaruhi oleh liberalisasi perdagangan global yang menurunkan biaya perdagangan, reformasi sektor transportasi, serta investasi besar-besaran pada infrastruktur logistik seperti pelabuhan dan jaringan jalan. Kondisi ini mendorong perusahaan untuk melakukan *offshoring* dan *outsourcing*, terutama dengan memindahkan tahapan produksi padat karya ke negara-negara dengan ketersediaan tenaga kerja melimpah dan biaya upah yang lebih rendah. Selain itu, integrasi perdagangan global juga mempermudah penggunaan bahan baku impor, dengan faktor-faktor seperti kedekatan geografis, hubungan historis kolonial, migrasi, dan kesamaan bahasa turut memfasilitasi pencocokan antara pembeli dan penjual lintas negara. Perubahan ini menandai pergeseran dari pola produksi nasional yang relatif terintegrasi menuju jaringan produksi global yang kompleks dan saling terhubung secara horizontal, vertikal, maupun diagonal.

Secara analitis, pendekatan GVC mencakup berbagai metode, antara lain *supply chain management framework*, studi kasus industri atau produk, pendekatan berbasis *input-output*, serta pendekatan lain yang menggunakan *gravity models* dan *equilibrium models* (Jones et al., 2019, 7). Penelitian ini menggunakan pendekatan *industry case studies* dengan fokus pada analisis tata kelola (*governance*) dalam jaringan komoditas global. Dalam literatur GVC, tata kelola rantai nilai umumnya dibedakan menjadi dua tipe utama, yakni *producer-driven* dan *buyer-driven* value chains. Pada *producer-driven GVC*, perusahaan multinasional memainkan peran dominan dalam mengendalikan sistem produksi melalui kepemilikan langsung, anak perusahaan, dan jaringan subkontraktor. Sebaliknya, pada *buyer-driven GVC*, kekuasaan utama berada di tangan peritel besar dan perusahaan perdagangan yang mengendalikan akses pasar, standar produk, dan strategi pembelian (Jones et al., 2019, 8–9).

Dalam penelitian ini, rantai pasok industri udang diposisikan sebagai *buyer-driven global value chain*, di mana kekuasaan utama berada di tangan peritel dan *supermarket* besar di negara pasar dalam menentukan harga, volume, dan standar produksi. Kerangka GVC dimanfaatkan untuk menganalisis bagaimana asimetri kekuasaan dalam tata kelola rantai nilai memungkinkan tekanan harga ditransmisikan dari pembeli global ke produsen lokal di negara-negara Asia Tenggara. Tekanan ini kemudian mendorong produsen untuk menekan biaya produksi, terutama biaya tenaga kerja, sebagai salah satu variabel yang paling fleksibel untuk disesuaikan. Dengan demikian, GVC berfungsi sebagai kerangka analitis untuk menjelaskan bagaimana dan mengapa kondisi kerja eksploitatif dan kerentanan keamanan manusia pekerja diproduksi secara sistematis dalam struktur ekonomi global, alih-alih sebagai akibat dari kegagalan individu atau anomali lokal semata.

Metodologi

Berdasarkan isu penelitian yang akan diteliti, periset menggunakan metode penelitian kualitatif yang berfokus pada eksplorasi dan menjelaskan bagaimana eksploitasi tenaga kerja di industri udang melalui lensa *human security* dan GVC. Pendekatan kualitatif berfokus pada *how* dan *why* sesuatu bekerja untuk membangun pemahaman dengan mengumpulkan observasi-observasi terkait dengan topik yang dipilih (Sullivan & Sargeant, 2011). Metode kualitatif membuka akses peneliti untuk menggali lebih dalam pada peristiwa spesifik, tempat, organisasi, atau kepribadian tertentu dengan data yang jelas dan cocok (Lamont, 2015, 21). Analisis dan ketajaman penelitian kualitatif sangat dipengaruhi oleh kata-kata dan kalimat yang digunakan. Oleh karena itu, fokus dari penelitian kualitatif adalah pada proses dan pemaknaan hasilnya.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian berasal dari data-data sekunder atau studi pustaka (*library research*) yang berasal dari analisis penulis terhadap dokumen-dokumen yang tersebar di internet, seperti jurnal, berita, buku, pernyataan tokoh tertentu yang dianggap vital, dan artikel yang berkaitan dengan objek penelitian. Karena penting dalam Hubungan Internasional untuk mempersempit topik sehingga tidak melebar ke mana-mana (Lamont, 2015, 22), periset hanya akan memfokuskan pada bagaimana kondisi tenaga kerja di tahap produksi industri udang dalam lensa *human security* secara internal dan pengaruh GVC dari sisi eksternal. Riset ini juga akan menggunakan metode studi literatur dengan melakukan analisis mendalam terhadap dokumen-dokumen atau literatur yang tersedia di internet, baik penelitian terdahulu, artikel jurnal, buku, laporan penelitian, dan dokumen relevan lainnya sehingga diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang kondisi tenaga kerja di rantai pasok industri udang Asia Tenggara dalam hubungannya dengan pembeli internasional dari negara-negara Barat.

Analisis

a. Realitas Kondisi Kerja di Tingkat Penambak dan Pengolahan Awal Indonesia

Untuk menjaga koherensi dan kedalaman analisis, penelitian ini tidak menggunakan seluruh dimensi keamanan manusia secara setara. Sebaliknya, analisis difokuskan pada dimensi-dimensi keamanan manusia yang secara empiris paling terdampak oleh dinamika *buyer-driven global value chain* industri udang. Pendekatan ini memungkinkan penjelasan yang lebih mendalam mengenai bagaimana tekanan struktural dalam GVC diterjemahkan menjadi pengalaman hidup pekerja di tingkat produksi. Indonesia digunakan sebagai *baseline case* karena ketersediaan data empiris yang paling rinci, sementara Vietnam dan Thailand dianalisis secara komparatif untuk mengidentifikasi apakah pola kerentanan yang serupa juga muncul di negara produsen udang lain di Asia Tenggara.

Melihat pasar internasional yang semakin terintegrasi dan saling terhubung antara satu bagian dengan bagian lainnya, Indonesia sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara mampu memproduksi udang budidaya (*aquaculture*) sekitar 941.646 ton pada tahun 2023 dan kemudian meningkat menjadi sekitar 1,13 juta ton pada tahun 2024. Dari hasil produksi tersebut, udang berkontribusi 34,5% dari total ekspor perikanan Indonesia dengan 202.464 ton pada tahun 2024, bernilai 1,6 miliar USD. Hal tersebut tampaknya menunjukkan bahwa Indonesia lebih berfokus untuk memenuhi kebutuhan domestik terlebih dahulu sebelum diekspor keluar. Namun, terdapat biaya dari hasil produksi dan nilai ekspor produksi udang Indonesia.

Laporan *Net Profits, Human Costs* yang disusun oleh Migunani, AKATIGA, dan ELSAM (2024) memberikan bukti empiris yang kuat mengenai mekanisme tersebut. Berdasarkan penelitian lapangan yang dilakukan pada periode 2023–2024 di sembilan provinsi utama penghasil udang di Indonesia, yakni Lampung, Bali, Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Banten, dan Jakarta -yang mewakili sekitar dua pertiga rantai pasok udang berorientasi ekspor- laporan ini mendokumentasikan wawancara mendalam dengan 221 informan kunci. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa tekanan harga dan tuntutan efisiensi dari pasar global secara sistematis diterjemahkan menjadi praktik kerja paksa dan kondisi kerja eksploitatif di tingkat produksi (Migunani et al., 2024, 1).

Salah satu pola utama yang teridentifikasi adalah penyalahgunaan kerentanan pekerja melalui

meluasnya penggunaan tenaga kerja informal tanpa kontrak kerja yang jelas. Ketidakformalan ini menempatkan pekerja di luar jangkauan perlindungan regulasi ketenagakerjaan negara, sehingga menciptakan kondisi yang memungkinkan praktik eksploitatif berlangsung tanpa mekanisme akuntabilitas yang efektif. Dalam beberapa kasus, laporan tersebut mencatat adanya penipuan dalam sistem rekrutmen dan kompensasi, di mana pekerja dijanjikan upah dasar dan bonus berbasis keuntungan panen. Namun, informasi keuangan sengaja dimanipulasi oleh pemilik tambak dengan mengklaim kerugian, sehingga pekerja tidak dapat mengakses bonus yang dijanjikan. Praktik ini menciptakan bentuk *debt-like dependence*, di mana pekerja tetap terikat pada tempat kerja dengan harapan memperoleh bonus yang tidak pernah terealisasi.

Lebih jauh, mekanisme paksaan di industri udang Indonesia menunjukkan pergeseran dari bentuk kekerasan langsung menuju kekerasan struktural dan simbolik. Pembatasan kebebasan bergerak melalui ancaman kehilangan upah, bonus, atau pekerjaan merefleksikan bagaimana dimensi keamanan personal dilanggar secara sistematis melalui tekanan ekonomi. Pekerja secara nominal “bebas” untuk keluar, namun secara material tidak memiliki pilihan realistis. Kondisi ini sejalan dengan kritik terhadap pendekatan hukum ketenagakerjaan konvensional yang cenderung gagal menangkap bentuk-bentuk paksaan non-fisik dalam konteks ekonomi global.

Selain itu, temuan AKATIGA juga menunjukkan degradasi serius terhadap keamanan pangan dan kesehatan pekerja. Banyak pekerja dilaporkan tidak memperoleh akses terhadap makanan yang layak dan bergizi karena perusahaan tidak menyediakan kebutuhan nutrisi dasar, meskipun pekerja diwajibkan berjaga selama 24 jam di area tambak. Akibatnya, pekerja harus mencari makanan sendiri ke desa terdekat dalam kondisi kelelahan ekstrem. Dalam kasus yang lebih parah, laporan tersebut mendokumentasikan kematian pekerja yang dibiarkan sakit selama beberapa hari tanpa akses terhadap perawatan medis atau perhatian dari pihak perusahaan (Migunani et al., 2024, 19). Kondisi ini diperparah oleh jam kerja yang panjang dan tidak manusiawi tanpa kompensasi yang memadai, yang secara terus-menerus menggerus keamanan kesehatan dan keamanan ekonomi pekerja. Hal tersebut memperlihatkan keterkaitan erat antara eksploitasi tenaga kerja dan ketiadaan tata kelola negara yang efektif di sektor perikanan budidaya.

Temuan-temuan tersebut menggambarkan bahwa kerentanan keamanan manusia di industri udang Indonesia bukanlah hal yang muncul dari ruang hampa dan terisolasi, melainkan merupakan hasil dari tekanan struktural dalam GVC yang menempatkan produsen di posisi rentan dan mendorong penekanan biaya tenaga kerja sebagai strategi bertahan. Dengan menggunakan Indonesia sebagai *baseline case*, analisis ini menegaskan bahwa eksploitasi tenaga kerja di industri udang merupakan konsekuensi sistemik dari tata kelola rantai nilai global, yang selanjutnya akan diuji secara komparatif melalui kasus Vietnam dan Thailand untuk menilai sejauh mana pola serupa juga terjadi di tingkat regional.

b. Biaya Manusia: Komparasi Eksploitasi di Indonesia dengan Vietnam dan Thailand dari Lensa Keamanan Manusia

Melihat pasar internasional yang semakin terintegrasi dan saling terhubung antara satu bagian dengan bagian lainnya, kondisi yang terdapat di Indonesia bukanlah fenomena yang eksklusif, melainkan salah satu bagian dari pola regional yang lebih luas. Vietnam, sebagai *global powerhouse* dalam produksi dan ekspor udang karena telah menjadi penyuplai udang terbesar kedua di dunia,

menyumbang sekitar 13-14% dari total ekspor udang sehingga dapat dikatakan industri udang merupakan *cornerstone* di sektor makanan laut Vietnam dengan jangkauan ekspor mencapai Eropa, Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, dan Korea Selatan (Do, 2023). Pada tahun 2022, Vietnam memproduksi 745,000 ton udang air payau dan terus meningkat hingga 1.3 juta ton pada tahun 2024 dan telah mengekspor hingga 4.3 miliar USD pada tahun 2023. Thailand sendiri sejak tahun 2010 terus kehilangan pasar ekspor utama ke Amerika Serikat, Uni Eropa, Tiongkok, dan Jepang. Thailand saat ini sedang menghadapi persimpangan jalan yang kritis. Thailand menghadapi pergeseran yang signifikan dalam dinamika pasar, dahulu dikenal sebagai *global export powerhouse*, sekarang justru mengalami penurunan volume ekspor hampir 60% dari 207.708 ton ke 130.101 ton pada periode 2016-2024, sedangkan konsumsi domestik melonjak 73% dari 78.650 ton pada tahun 2016 menjadi 136.000 pada tahun 2024 (AQUA CULTURE: Asia Pacific, 2025). Penurunan tingkat ekspor industri udang Thailand disebabkan oleh tingginya biaya produksi dibanding dengan negara-negara lain dengan tingkat biaya produksi langsung sekitar 3.7-4.5 USD per kg, tetapi tetap secara struktur ekspor dan impor, Thailand masih menjadi *net exporter* karena volume impornya hanya 15.781 ton pada tahun 2024 (AQUA CULTURE: Asia Pacific, 2025).

Namun, terdapat penelitian dan informasi yang menyorot hal-hal di balik angka yang terlihat besar tersebut, biaya yang disembunyikan dari berjalannya negara-negara produsen udang di Asia Tenggara. Di Thailand, lebih dari 100 pekerja meninggal dunia di sektor makanan laut setiap tahunnya (Board, 2024), atau para pekerja Vietnam yang mengupas dan membersihkan udang dengan waktu kerja enam atau tujuh hari seminggu di ruangan yang sangat dingin. Kejadian tersebut dapat dikatakan sebagai eksploitasi tenaga kerja dalam industri udang. Untuk memahami biaya manusia, kerangka Keamanan Manusia yang pendekatannya berpusat pada manusia (*people-centered*) mengakui adanya ancaman terhadap kondisi-kondisi yang non-tradisional, seperti kekerasan personal, kelaparan, penyakit, kemiskinan, dan ancaman lainnya. Untuk keperluan riset ini, indikator *human security* yang digunakan adalah keamanan ekonomi, keamanan pangan, keamanan kesehatan, keamanan lingkungan, keamanan *personal* atau pribadi, dan keamanan politik.

Dengan menggunakan tujuh dimensi keamanan manusia sebagai indikator, kita dapat melihat gambaran mengenai dampak industri udang terhadap para pekerjanya di sektor produksi. Kondisi kerja yang didokumentasikan di Indonesia, Vietnam dan Thailand secara kumulatif menciptakan keadaan ketidakamanan yang parah dan meluas di berbagai dimensi kehidupan pekerja. Dari sisi keamanan ekonomi, pendapatan pekerja udang di Vietnam telah menurun antara 20-60% sejak pandemi, mereka juga menghadapi upah di bawah standar, lembur dan bonus yang tidak dibayar, serta hilangnya tunjangan kesehatan, transparansi upah sangat rendah, di mana banyak pekerja tidak mengetahui gaji mereka di muka atau bagaimana pemotongan dihitung (Nakamura, 2024, 3); Thailand sendiri terkenal dengan praktik *debt bondage* karena biaya rekrutmen yang sangat tinggi sehingga terdapat relasi kuasa yang timpang antara pekerja dan pemberi kerja yang mana pekerja menjadi aktor yang sangat rentan. Pada tahun 2014 dan 2015, laporan dari The Guardian dan The Associated Press mengungkap meluasnya perbudakan dan penyalahgunaan tenaga kerja di industri udang Thailand dan hal tersebut mencoreng citra mereka, bahkan hingga saat ini (AP, 2015), Thailand masih menjadi negara yang ditandai oleh Amerika Serikat meskipun telah dilakukan reformasi peraturan IUU oleh pemerintahan Junta untuk mengakhiri masalah tersebut.

Dari sisi *health security*, kondisi kerja yang tidak aman dan tidak sehat secara langsung mengancam kesehatan fisik dan mental para pekerja. Laporan di Vietnam menunjukkan adanya cerita

dari pengupas udang di distrik My Xuyen, Provinsi Soc Trang yang mengatakan bahwa dirinya harus membeli *protective gear* dari perusahaan dan harus bekerja di ruangan kerja yang dingin dan licin selama 10-12 jam setiap harinya sehingga pengupas udang tersebut terkadang melukai tangannya sendiri karena ingin menyelesaikan tugasnya secepat mungkin di bawah suhu yang sangat rendah tanpa adanya perlindungan (Nakamura, 2024, 20). Kondisi serupa dengan skala yang lebih masif dan sistematis juga ditemukan di Thailand di mana eksploitasi tenaga kerja di Thailand melibatkan korupsi dan persekongkolan di antara polisi dan otoritas, terdapat gudang besar yang di dalamnya toilet dipenuhi dengan kotoran, bau busuk dari limbah mentah tercium dari selokan terbuka di luar area kerja dengan anak-anak kecil berlari tanpa alas kaki melewati kamar-kamar asrama yang sesak. Bahkan, para pekerja hanya memikirkan cara melarikan diri karena kondisi lingkungan kerjanya sudah tidak manusiawi lagi, seorang perempuan yang sedang hamil delapan bulan mengalami keguguran di lantai gudang dan dipaksa untuk terus mengupas udang selama empat hari sambil mengalami pendarahan dan seorang balita yang tidak sadarkan diri ditolak untuk memperoleh perawatan medis (AP, 2015). Kejadian tersebut menggambarkan kondisi yang mengerikan dan tidak higienis tanpa adanya akses ke perawatan medis yang memadai.

Jika dari sisi keamanan pribadi, dimensi ini berkaitan langsung dengan “*freedom from fear*”. Thailand memiliki sejarah kelam yang berkaitan dengan kerja paksa yang mana para pekerja, entah itu pekerja lokal maupun migran dipaksa bekerja di atas kapal penangkap ikan atau di fasilitas pengolahan dengan ancaman kekerasan ekstrem, mengalami pemukulan jika telat bekerja, kekerasan verbal dengan dipanggil “*cows*” dan “*buffaloes*” karena lambat dalam mengupas udang, terus dipaksa untuk bekerja tanpa diberi kesempatan untuk beristirahat layaknya budak. Model bisnis yang ada di Vietnam menekan pekerja hingga di bawah upah layak dan menipu mereka terkait bonus sehingga membentuk paksaan ekonomi yang kuat. Pekerja di industri udang Vietnam sendiri mengalami pembatasan gerak dan ketentuan kontrak yang semakin memburuk sejak pandemi, sedangkan supermarket tetap meraup untung yang tinggi dari udang, 30% dari pekerja udang memiliki kewajiban pada saat jam kerja dan tidak bisa meninggalkan tempat kerja dan 91% pekerja tidak diberi upah lembur (Nakamura, 2024, 14).

Jika melihat dari sisi keamanan lingkungan, *catch per unit effort* (CPUE) atau hasil tangkapan ikan per jam di Teluk Thailand dan Laut Andaman telah menurun lebih dari 86% sejak tahun 1966 (EJF, 2015, 26), ini menjadikan perairan Thailand sebagai salah satu wilayah yang paling banyak ditangkap secara berlebihan (*overfishing*) di dunia. Secara keseluruhan, CPUE di Laut Teluk dan Laut Andaman telah anjlok lebih dari 86% sejak tahun 1966, sehingga menjadikan perairan Thailand sebagai salah satu wilayah yang paling banyak ditangkap secara berlebihan di dunia. Hal ini tentu mendorong degradasi lingkungan yang mendorong perompak dan perbudakan di industri perikanan Thailand, yakni Kantang. Selain itu, Boonlarp *fishing vessels* dari Thailand yang terlibat dalam perbudakan dan perdagangan manusia juga melakukan IUU di laut Indonesia, Thailand, dan Malaysia yang menggunakan *trawl* sehingga merusak ekosistem laut pesisir. Diperkirakan terdapat 65.000 hektar hutan bakau yang telah diubah ke tambak udang sejak pertengahan 1980-an sehingga setiap 1 kg udang, 434 gram perikanan hilang karena peralihan habitat (Environmental Justice Foundation, 2003, 7). Di sisi lain, Vietnam lebih banyak berkaitan dengan dampak dari perubahan iklim terhadap *aquaculture*. Vietnam sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim, seperti kenaikan permukaan air laut, naiknya temperatur dan frekuensi hujan, semakin seringnya cuaca ekstrem, kekeringan, dan perubahan salinitas yang memengaruhi lingkungan pesisir. Selain itu, budi daya intensif dan

semi-intensif udang seringkali tidak berkelanjutan (Tran et al., 2022, 6-11). Data dari Vietnam menunjukkan bahwa produktivitas menurun tajam dan risiko wabah penyakit meningkat setelah 5-10 tahun berjalannya sistem tersebut.

Terakhir, terdapat ironi tragis di mana para pekerja yang bekerja di tingkat paling bawah dalam rantai pasok udang -memproduksi makanan untuk pasar global- justru mengalami kerawanan pangan. Upah yang tidak menentu (kerentanan ekonomi) secara langsung berpengaruh pada kapabilitas pekerja untuk membeli makanan yang layak dan bergizi bagi diri mereka sendiri dan keluarga mereka, sebuah gambaran nyata dari hilangnya *“freedom from want”* dan sangat ironis melihat bahwa sektor perikanan, termasuk sektor udang telah diperhatikan sebagai mesin pertumbuhan ekonomi yang penting untuk keamanan pangan dan pendapatan devisa. Misalnya, pekerja udang di Vietnam yang pendapatannya mengurang 20-60% karena pemangkasan upah, upah lembur yang tidak dibayar, hilangnya akses jaminan sosial dan pembayaran bonus yang sangat berkurang atau dieliminasi (Nakamura, 2024, 3). Di Thailand sendiri terdapat kasus di mana penduduk lokal tempat tambak lokal dibangun menjadi miskin dan investor asing menjadi kaya –tidak ada *trickle-down* ke mereka (Environmental Justice Foundation, 2003, 16).

Gambar 2. Matriks Perbandingan Eksploitasi dan Keamanan Manusia di Industri udang

Dimensi Keamanan Manusia	Vietnam	Thailand
Ekonomi	Penurunan pendapatan drastis (20-60%), upah di bawah standar, penipuan bonus.	Terkenal dengan fenomena <i>debt bondage</i> bagi pekerja migran, upah rendah/tidak dibayar.
Kesehatan	Kondisi kerja yang sangat dingin dengan peralatan APD tidak memadai, dan risiko infeksi bagi pekerja perempuan.	Kondisi tidak higienis dan berbahaya di "Lhongs" atau gubug pengupasan di masa lalu.
Pribadi	Paksaan ekonomi melalui upah rendah dan jam kerja panjang.	Peristiwa kerja paksa dan perbudakan manusia, kekerasan fisik, dan perdagangan manusia.
Lingkungan	Degradasi akibat intensifikasi, kerentanan tinggi terhadap perubahan iklim.	Penangkapan ikan berlebihan untuk pakan udang merusak

		ekosistem laut pesisir.
Pangan	Dampak dari ancaman keamanan ekonomi langsung memengaruhi kapabilitas kemampuan pekerja untuk membeli makanan yang sehat dan bergizi untuk dirinya sendiri dan keluarga.	Kurang lebih serupa dengan Vietnam, hanya saja di Thailand terhadap konflik lahan antara penduduk lokal dan investor kaya yang membuat mata pencaharian mereka direnggut.

c. Struktur Kerentanan: Analisis Rantai Nilai Global

Asimetri kekuasaan ini secara langsung diterjemahkan menjadi tekanan harga yang hebat. Laporan dari Vietnam secara konsisten menunjukkan bahwa praktik pembelian peritel secara aktif menekan harga di tingkat penambak (*farm gate price*), seringkali hingga ke tingkat yang berada di bawah biaya produksi yang sebenarnya. Ketika peritel membayar harga yang lebih rendah kepada eksportir, eksportir kemudian menekan harga yang mereka bayar kepada penambak untuk mempertahankan margin mereka.

Praktik eksploitasi tenaga kerja yang ditemukan di Vietnam dan Thailand bukanlah hasil dari keputusan individual semata atau sekadar akibat perilaku aktor yang bersifat keji, melainkan merupakan konsekuensi dari tekanan struktural yang mengalir di sepanjang Global Value Chain (GVC) dan diperkuat oleh konfigurasi kebijakan serta tata kelola negara. GVC beroperasi melalui proses produksi dari hulu ke hilir yang terfragmentasi dan terspesialisasi di berbagai lokasi, di mana relasi kekuasaan ekonomi dan regulatif terdistribusi secara tidak merata. Dalam konteks industri udang, GVC menghubungkan jutaan penambak kecil dan pekerja informal di Asia Tenggara dengan negara pasar (*market states*) di negara-negara Barat, diatur oleh dinamika kekuasaan yang timpang serta kerangka kebijakan nasional dan internasional yang belum mampu melindungi aktor paling rentan.

Rantai nilai udang global merupakan contoh klasik dari *buyer-driven global value chain*, di mana kekuasaan utama berada di tangan pembeli besar di ujung hilir rantai pasok. Dalam model ini, perusahaan ritel multinasional -seperti Walmart, Kroger, Costco di Amerika Serikat, serta Tesco di Eropa- memiliki kapasitas dominan untuk menentukan standar kualitas, spesifikasi produk, mekanisme sertifikasi, dan terutama harga. Kekuatan tersebut bersumber dari konsolidasi pasar ritel yang masif, yang menciptakan struktur oligopsoni: hanya segelintir pembeli besar berhadapan dengan ribuan hingga jutaan produsen kecil yang tersebar dan terfragmentasi (Nakamura, 2024, 27).

Kasus Vietnam menunjukkan bagaimana keputusan pasar global ini berinteraksi dengan kebijakan domestik. Sejak pandemi, supermarket Barat secara sistematis menekan harga udang impor -bahkan hingga berada di bawah biaya produksi- untuk menjaga margin keuntungan mereka (Nakamura, 2024, 1). Tekanan harga ini kemudian ditransmisikan ke tingkat nasional melalui eksportir dan perusahaan pengolahan. Dalam konteks kebijakan, negara produsen seperti Vietnam dan

Thailand cenderung memprioritaskan stabilitas ekspor, daya saing harga, dan pertumbuhan sektor perikanan sebagai sumber devisa, sering kali dengan mengorbankan perlindungan tenaga kerja. Lemahnya penegakan regulasi ketenagakerjaan, tingginya ketergantungan pada tenaga kerja informal, serta terbatasnya pengawasan di sektor akuakultur menciptakan ruang abu-abu regulatif yang memungkinkan eksploitasi berlangsung secara sistemik.

Struktur ini menghasilkan asimetri kekuasaan yang ekstrem. Di satu sisi, terdapat peritel multinasional dengan *bargaining power* yang besar dan kemampuan untuk berpindah sumber pasokan secara global. Di sisi lain, terdapat penambak kecil dan menengah di Thailand dan Vietnam yang sebagian besar beroperasi secara semi-intensif atau tradisional, dengan tingkat organisasi kolektif yang rendah dan akses terbatas terhadap perlindungan negara. Dalam rantai pasok domestik, penambak sering kali bergantung pada satu atau beberapa pembeli -pabrik pengolahan atau jaringan tengkulak- sehingga posisi tawar mereka semakin lemah. Dalam konfigurasi kebijakan dan pasar seperti ini, model bisnis rantai pasok udang yang eksploitatif justru menjadi rasional dan menguntungkan bagi perusahaan besar, sementara produsen di Vietnam mengalami penurunan daya jual meskipun harga ritel di pasar Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Eropa meningkat (Nakamura, 2024, 21).

d. Tekanan Harga, Distribusi Pendapatan, dan Dualisme Rantai Pasok

Asimetri kekuasaan ini secara langsung diterjemahkan menjadi tekanan harga yang hebat. Laporan dari Vietnam secara konsisten menunjukkan bahwa praktik pembelian peritel secara aktif menekan harga di tingkat penambak (*farm gate price*), seringkali hingga ke tingkat yang berada di bawah biaya produksi yang sebenarnya. Ketika peritel membayar harga yang lebih rendah kepada eksportir, eksportir kemudian menekan harga yang mereka bayar kepada penambak untuk mempertahankan margin mereka.

Asimetri kekuasaan dalam GVC udang diterjemahkan secara langsung menjadi tekanan harga di tingkat produksi. Laporan dari Vietnam menunjukkan bahwa praktik pembelian peritel global secara aktif menekan harga di tingkat penambak (*farm-gate price*), sering kali hingga berada di bawah biaya produksi aktual. Ketika peritel membayar harga rendah kepada eksportir, eksportir kemudian mentransmisikan tekanan tersebut kepada penambak dan pekerja untuk mempertahankan margin keuntungan.

Analisis distribusi pendapatan dalam rantai pasok udang Vietnam periode 2023–2024 memperlihatkan ketimpangan yang mencolok antar aktor. *Middleman* memperoleh *return on investment* hingga 50%, diikuti oleh supermarket dan perusahaan pakan, sementara penambak udang hanya menerima kurang dari 10% dari total nilai tambah (Nakamura, 2024, 22). Pola ini menunjukkan bahwa sistem pasar tidak bekerja dalam ruang hampa, melainkan dalam kerangka tata kelola yang memungkinkan aktor tertentu—khususnya perantara dan pembeli global—menyerap keuntungan, sementara risiko dan kerugian dialihkan ke aktor paling bawah dalam rantai nilai.

Di Thailand, meskipun tidak tersedia data kuantitatif serupa mengenai distribusi *return on investment*, struktur aktor dalam rantai pasok menunjukkan pola kerentanan yang sebanding. Sekitar 60% produksi udang dikuasai oleh penambak kecil independen yang sangat rentan terhadap fluktuasi harga, penyakit, dan kenaikan biaya input. *Middleman* merupakan aktor paling krusial sekaligus

paling buram, mengendalikan sekitar 90% aliran udang domestik, sementara perusahaan pengolahan dan eksportir -seperti Thai Union Group- beroperasi dalam struktur yang terkonsentrasi dan berinteraksi langsung dengan pembeli internasional (Rubel et al., 2019, 22). Dalam konteks ini, negara berperan sebagai regulator yang lemah, dengan kapasitas terbatas untuk mengawasi praktik informal dan hubungan kerja yang eksploitatif.

Kombinasi tekanan pasar global dan kelemahan tata kelola nasional menciptakan dualisme rantai pasok. Di satu sisi, terdapat rantai pasok formal yang dapat diaudit untuk memenuhi tuntutan sertifikasi dan kepatuhan etis dari pasar Barat. Di sisi lain, terdapat rantai pasok informal yang luas dan tidak transparan, yang dioperasikan melalui jaringan middleman dan outsourcing. Rantai informal ini bukanlah anomali, melainkan komponen fungsional yang memungkinkan GVC menyerap tekanan biaya dan risiko tanpa mengganggu citra kepatuhan di tingkat global.

Secara keseluruhan, arsitektur GVC udang menciptakan sebuah *race to the bottom* yang diproduksi melalui interaksi antara sistem pasar global, strategi bisnis aktor dominan, dan kebijakan negara yang berorientasi pada daya saing ekspor (Walhout, 2024). Ketika peritel global mencari harga termurah, negara produsen terdorong untuk mempertahankan iklim investasi yang “kompetitif”, sementara eksportir dan produsen domestik mengadopsi model bisnis yang paling murah dan fleksibel -sering kali melalui eksploitasi tenaga kerja informal.

Analisis melalui kerangka Keamanan Manusia ini mengungkapkan sebuah kebenaran yang penting: eksploitasi kerja di GVC udang bukanlah sekadar serangkaian pelanggaran hak-hak buruh yang terpisah. Ini adalah sebuah serangan yang sistematis dan saling terkait terhadap seluruh spektrum keamanan dan martabat manusia. Kerentanan ekonomi secara langsung menyebabkan ketidakmampuan untuk membeli pangan yang layak dan mengakses layanan kesehatan dasar yang memadai. Kondisi kerja yang berbahaya (mengancam kesehatan) dan ancaman kekerasan, baik fisik maupun mental di lingkungan kerja menciptakan lingkungan ketakutan dengan kondisi yang menjebak pekerja untuk tetap terikat dengan pemberi kerjanya. Dengan demikian, model bisnis GVC ini tidak hanya mengeksploitasi tenaga kerja, tetapi secara aktif memproduksi kerentanan dalam setiap aspek fundamental kehidupan para pekerjanya. Ini mengubah framing masalah dari sekadar isu kepatuhan perburuhan menjadi isu hak asasi manusia dan martabat manusia yang mendasar.

Kesimpulan

Dalam beberapa area, studi ini menambah korpus literatur yang sudah ada. Dengan mengaplikasikan *framework* keamanan manusia ke dalam konteks kondisi tenaga kerja di industri udang Asia Tenggara yang berfokus pada negara Thailand dan Vietnam. Selain itu, dapat disimpulkan bahwa GCV udang telah menciptakan sistem eksploitasi multidimensi yang sistematis dan saling terkait yang menargetkan pekerja di tingkat produksi demi keuntungan perusahaan di pasar global.

Temuan empiris di Indonesia menunjukkan praktik kerja paksa, manipulasi bonus, pembatasan pergerakan, jam kerja tidak manusiawi, serta pengabaian akses pangan dan kesehatan dasar, yang terutama menimpa pekerja informal tanpa perlindungan hukum. Pola serupa terkonfirmasi di Vietnam dan Thailand melalui lensa *human security framework*: penurunan pendapatan 20-60% (ekonomi), kondisi kerja berbahaya tanpa alat pelindung memadai (kesehatan), kerja paksa dan kekerasan fisik/verbal (pribadi), serta kerusakan ekosistem masif akibat overfishing dan alih fungsi hutan bakau (lingkungan). Ironisnya, pekerja produsen pangan global ini justru mengalami kerentanan pangan akibat upah rendah dan tidak pasti.

Akar masalah terletak pada struktur GVC yang digerakkan pembeli (*buyer-driven*), di mana retailer raksasa (Walmart, Tesco, Costco, dll.) memaksakan tekanan harga ekstrem melalui oligopsoni. Asimetri kekuasaan ini memicu *race to the bottom*, harga udang di tingkat petambak seringkali di bawah biaya produksi, sementara perantara *middlemen* meraup 50% keuntungan. Dualisme rantai pasok (formal-informal) memfasilitasi eksploitasi terstruktur melalui *outsourcing*, sementara ketergantungan penambak kecil pada pembeli tunggal memperparah kerentanan. Dengan demikian, eksploitasi dalam GVC udang bukan sekadar pelanggaran hak buruh sporadis, melainkan serangan terstruktur terhadap harkat, hak, dan harga diri manusia yang diproduksi oleh arsitektur ekonomi global. Transformasi mendesak diperlukan –dari sekadar kepatuhan perburuan menuju penataan ulang hubungan kekuasaan dalam rantai pasok– untuk mengembalikan hak dasar pekerja atas ekonomi, kesehatan, lingkungan, dan pangan yang berkelanjutan.

Referensi

- AP. (2015, 14 Desember). *Global supermarkets selling shrimp peeled by slaves*. The Associated Press. Diakses pada 25 Juni 2025 dari <https://www.ap.org/news-highlights/uncategorized/2015/global-supermarkets-selling-shrimp-peeled-by-slaves/>
- AQUA CULTURE: Asia Pacific. (2025, 8 Mei). *Thailand's shrimp farming industry: Navigating global market shifts*. Aqua Culture Asia Pacific. Diakses pada 25 Juni 2025 dari <https://aquaasiapac.com/2025/05/08/thailands-shrimp-farming-industry-navigating-global-market-shifts/>
- Board, J. (2024, 16 Mei). *Pembunuhan dan perbudakan di laut: Rencana amandemen UU perikanan Thailand mengancam awak kapal*. CNA Indonesia. Diakses pada 25 Juni 2025 dari <https://www.cna.id/asia/pembunuhan-dan-perbudakan-di-laut-rencana-amandemen-uu-perikanan-thailand-mengancam-awak-kapal-16326>
- Brugere, C., Bansal, T., Kruijssen, F., & Williams, M. (2023). *Humanizing aquaculture development: Putting social and human concerns at the center of future aquaculture development*. *Journal of the World Aquaculture Society*, 54(2), 483–518. <https://doi.org/10.1111/jwas.12959>
- Caballero-Anthony, M. (2015). *Community security: Human security at 21*. *Contemporary Politics*, 21(1), 53–69. <https://doi.org/10.1080/13569775.2014.994812>
- Caballero-Anthony, M. (Ed.). (2016). *An introduction to non-traditional security studies: A transnational approach*. London: SAGE Publications.
- CBS News. (2024, 30 September). *Shrimp farmers in Asia exploited by U.S. supermarkets for big profits, research finds*. CBS News. Diakses pada 25 Juni 2025 dari <https://www.cbsnews.com/news/shrimp-farmers-slave-labor-target-walmart-costco/>
- Chase, C. (2024, 9 September). *Investigation finds increasing labor exploitation in Vietnam's shrimp industry as prices drop*. Seafood Source. Diakses pada 25 Juni 2025 dari

<https://www.seafoodsource.com/news/environment-sustainability/investigation-finds-increasing-labor-exploitation-in-vietnam-s-shrimp-industry-as-prices-drop>

Dijk, M. P. van, & Trienekens, J. (Eds.). (2012). *Global value chains: Linking local producers from developing countries to international markets*. Amsterdam: Amsterdam University Press.

Do, T. (2023, 11 Desember). *Shrimp farming in Vietnam: Opportunities for foreign firms*. Vietnam Briefing. Diakses pada 25 Juni 2025 dari <https://www.vietnam-briefing.com/news/shrimp-farming-in-vietnam-opportunities-for-foreign-firms.html/>

Environmental Justice Foundation. (2003). *Smash & grab: Conflict, corruption & human rights abuses in the shrimp farming industry*. London: Environmental Justice Foundation.

Environmental Justice Foundation. (2015). *Thailand's seafood slaves: Human trafficking, slavery and murder in Kantang's fishing industry*. London: Environmental Justice Foundation. <https://ejfoundation.org/reports/thailands-seafood-slaves>

Gereffi, G., Fernandez, K., & Arnold, D. (2017, 30 Oktober). *Global value chains analysis: A tool to promote economic development*. LSE Blogs. Diakses pada 25 Juni 2025 dari <https://blogs.lse.ac.uk/gild/2017/10/30/global-value-chains-analysis-a-tool-to-promote-economic-development/>

Hama, H. H. (2017). *State security, societal security, and human security*. *Jadavpur Journal of International Relations*, 21(1), 1–15. <https://doi.org/10.1177/0973598417706591>

Indraswari, F. (2024). *Rethinking border management: A human security approach to combating human trafficking in the Mekong subregion*. *Journal of ASEAN Studies*, 12(2), 353–382. <https://doi.org/10.21512/jas.v12i2.11591>

Jones, L., Demirkaya, M., & Bethmann, E. (2019). *Global value chain analysis: Concepts and approaches*. *Journal of International Commerce and Economics*, 1–11. Diakses pada 25 Juni 2025 dari https://www.usitc.gov/staff_publications/all?search=Global+Value+Chain+Analysis

Lamont, C. (2015). *Research methods in international relations*. London: SAGE Publications.

Migunani, AKATIGA, & ELSAM. (2024). *Net profits, human costs: How supermarkets shape exploitation in shrimp aquaculture*. Bandung: AKATIGA. Diakses pada 25 Juni 2025 dari <https://www.akatiga.org/wp-content/uploads/2024/09/Net-Profits-Human-Costs-Indonesia-Report.pdf>

Mumtazinur, M., & Wahyuni, Y. S. (2021). *Keamanan individu (personal security) dan qanun hukum keluarga: Tinjauan konsep keamanan manusia*. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 4(1), 76–80. <http://dx.doi.org/10.22373/ujhk.v4i1.8504>

Nakamura, K. (2024). *Laboring for less so supermarkets profit more: How Western supermarkets are shortchanging consumers and farmers – and driving shrimp workers into poverty*.

Sustainability Incubator. Diakses pada 25 Juni 2025 dari

https://www.sustainability-incubator.com/wp-content/uploads/2024/09/Laboring-for-less_Vietnam-shrimp_September-12-2024.pdf

Pegler, L. (2011). *Sustainable value chains and labour: Linking chain and “inner drivers”*.

International Institute of Social Studies. Diakses pada 25 Juni 2025 dari

<https://www.researchgate.net/publication/241755565>

Rising, D. (2024, 30 September). *Takeaways from AP's report on how shrimp farmers are exploited as supermarkets push for low prices*. AP News. Diakses pada 25 Juni 2025 dari

<https://apnews.com/article/shrimp-exploitation-workers-vietnam-indonesia-india-supermarket-b1e8837fbb8163a6f284d6126be0493b>

Rubel, H., Woods, W., Perez, D., Unnikrishnan, S., Zum Felde, A. M., Zielcke, S., Lidy, C., & Lanfer,

C. (2019). *A strategic approach to sustainable shrimp production in Thailand: The case for improved economics and sustainability*. Boston Consulting Group. Diakses pada 25 Juni 2025 dari <https://docslib.org/doc/1444225>

Tran, N., Chan, C. Y., Aung, Y. M., Bailey, C., Akester, M., Cao, Q. L., Trinh, T. Q., Hoang, C. V.,

Sulser, T. B., & Wiebe, K. (2022). *Foresighting future climate change impacts on fisheries and aquaculture in Vietnam*. *Frontiers in Sustainable Food Systems*, 6, 1–12. <https://doi.org/10.3389/fsufs.2022.829157>

Walhout, H. (2024, 27 Maret). *A new report sheds light on the problems behind our imported shrimp*.

FoodPrint. Diakses pada 25 Juni 2025 dari <https://foodprint.org/blog/imported-shrimp/>